

Jejak Historis *Haenyeo* sebagai Simbol Kebudayaan Jeju: Gerakan Resistensi terhadap Imperialisme Jepang, 1931-1932

Amelia Isti Farhan^{1*}, Rostineu²

¹ Universitas Indonesia; amelia.isti01@ui.ac.id

² Universitas Indonesia; rostineu31@ui.ac.id

*Korespondensi

Dikirim: 02-09-2022; Diterima: 27-10-2022; Diterbitkan: 29-12-2022

Abstract: *Haenyeo* or 'female divers' have been the livelihood of most women in Jeju since 1700 years ago. When Japan launched its capitalist action in Korea in the 1930s, the participation of the *haenyeo* was considered beneficial to the colonial economy because of their skills in collecting Jeju Island seafood. By using history method, this study tries to look at the track record of the *haenyeo* who had become symbols of Jeju's history and culture, as one of the agents who fought for the rights of the Jeju people during the Japanese imperialism period 1931-1932, when Japan exploitation on Jeju fishing sector had grown massive. This study also sees the important influence of enlightenment education in growing awareness and fighting spirit of the *haenyeo*, so that they were able to overcome their limitations as a subordinated group within the social and economic structure, to appear as agents capable of driving colonial resistance actions.

Keywords: Japanese imperialism; Jeju; *haenyeo* resistance movement

Abstrak: *Haenyeo* atau 'penyelam perempuan' telah menjadi suatu mata pencaharian sebagian besar perempuan di Jeju sejak 1700 tahun yang lalu. Ketika Jepang melancarkan aksi kapitalismenya di Korea pada tahun 1930-an, partisipasi *haenyeo* dinilai menguntungkan perekonomian kolonial karena keterampilan mereka dalam mengumpulkan hasil laut Pulau Jeju. Dengan menggunakan metode sejarah dan studi literatur, penelitian ini mencoba melihat rekam jejak para *haenyeo* yang telah menjadi simbol sejarah dan kebudayaan Jeju, sebagai salah satu agen yang memperjuangkan hak rakyat Jeju pada masa imperialisme Jepang 1931-1932, ketika eksploitasi Jepang di sektor perikanan Jeju semakin masif. Penelitian ini juga melihat adanya pengaruh penting pendidikan pencerahan dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat juang para *haenyeo*, sehingga mereka mampu meretas keterbatasan mereka sebagai golongan yang ter subordinasi dalam struktur sosial dan ekonomi, untuk tampil sebagai agen yang mampu memotori aksi resistensi kolonial.

Kata Kunci: gerakan resistensi *haenyeo*; Jeju; imperialisme Jepang



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Haenyeo, yang secara harfiah berarti 'sea women' atau 'perempuan air' merupakan suatu bentuk mata pencaharian perempuan Jeju sebagai perempuan penyelam, yang diperkirakan telah ada sejak 1.700 tahun yang lalu, serta telah menjadi warisan kebudayaan Jeju. Pada tahun 2016, *haenyeo* Jeju secara resmi ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Non Benda

(*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) UNESCO. Selain merepresentasikan kebudayaan lokal Jeju, *haenyeo* juga termasuk salah satu profesi perempuan yang terbentuk pada masa kolonial, yang menandai lahirnya perempuan Korea modern (Lee & Myong, 2018). Pulau Jeju sendiri dikenal sebagai Pulau Para Dewi, diperkuat dengan mitos mengenai legenda pembentukan pulau ini yang memiliki corak matriarkal, yakni ‘*Grandmother Seolmundae*’, yang telah dikemas menjadi media turisme. Mitos ini merepresentasikan kegagahan perempuan Jeju, melambangkan pembentukan Pulau Jeju yang tidak lepas dari peran para dewi (Preston, 2017). Hal ini menunjukkan begitu kuatnya representasi perempuan Jeju, salah satunya para *haenyeo*. Mereka dikenal akan keunikannya yang mampu menyelam di kedalaman laut sejauh 20 meter tanpa alat bantu canggih, untuk mengumpulkan berbagai hasil laut seperti abalon, rumput laut, dan makanan laut lainnya. Pada masa pendudukan Jepang (1911-1945), alat-alat bantu yang digunakan para *haenyeo* masih bersifat tradisional, yakni berupa *homi* (ikatan handuk putih di kepala) dan *bichang* (alat yang menyerupai cangkul untuk menangkap abalon).

Di samping keunikannya sebagai penyelam perempuan, *haenyeo* juga telah meninggalkan jejak historis yang begitu penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Korea pada masa pendudukan Jepang (1910-1945). Pada Januari 1932, terjadi gerakan resistensi anti-Jepang besar-besaran dengan jumlah partisipan sekitar 17.000 orang. Gerakan yang dilakukan oleh para *haenyeo* yang berasal dari bagian utara Pulau Jeju ini dilatarbelakangi oleh ketidakadilan Asosiasi Perikanan Haenyeo Jeju (*Haenyeo Eoeb Johab*), sebuah lembaga yang mengatur sistem kerja *haenyeo*, dan diketuai oleh pihak pemerintah kolonial Jepang. Ketidakadilan tersebut berupa kebijakan-kebijakan di sektor perikanan yang bersifat eksploitatif, khususnya bagi para *haenyeo*. Gerakan resistensi ini dinilai sebagai gerakan anti-Jepang terbesar yang digerakkan oleh perempuan dalam sejarah Korea. Penulis ingin menunjukkan bahwa gerakan perlawanan terhadap penjajahan yang dimotori oleh *haenyeo* Jeju dalam konteks lokal memiliki nilai kesejarahan yang unik dan penting, serta tidak dapat diabaikan dalam memahami *haenyeo* Jeju sebagai warisan kebudayaan yang telah diakui secara internasional.

Tahun 1919 merupakan momentum bagi rakyat Korea untuk mulai memiliki kesadaran akan ketertindasan mereka di bawah pendudukan Jepang. Kaum pelajar Korea mulai merencanakan upaya kemerdekaan pada Februari 1919, setahun setelah Perang Dunia I pecah. Namun, upaya tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 1 Maret yang bertepatan dengan dua hari sebelum upacara pemakaman Raja Kojong, raja terakhir Dinasti Joseon (1392-1910), sehingga gerakan ini kemudian dikenal dengan nama Gerakan Satu Maret (*Samil Undong*). Aksi ini kemudian dilakukan pada pagi hari 1 Maret 1919 di Seoul di seluruh penjuru negeri. Namun, aksi ini berujung pada kekacauan—penembakan, pembunuhan, dan pembakaran gereja-gereja serta pedesaan. Lebih dari 500 rakyat Korea gugur dalam aksi demonstrasi ini (Hwang, 2010). Namun, Gerakan Satu Maret belum berhasil mengantarkan rakyat Korea pada gerbang kemerdekaan, namun semangat rakyat Korea untuk memerdekakan diri tidak berhenti begitu saja, tidak terkecuali warga pedesaan di pulau Jeju, khususnya para *haenyeo* Jeju di Sehwa-ri, Gujwa-eub (bagian utara Pulau Jeju). Pada masa kolonialisme Jepang di Korea, peningkatan perekonomian Jeju tidak lepas dari peranan para *haenyeo* sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Terlebih lagi, partisipasi *haenyeo* dalam meningkatkan

perekonomian Jeju berkembang dengan sangat pesat pada tahun 1930-an, ketika Jepang melancarkan kebijakan kapitalismenya di Pulau Jeju. Jepang menilai bahwa memperkerjakan para *haenyeo* merupakan jalan terbaik untuk upaya kapitalismenya dalam sektor perekonomian perikanan Jeju yang berkembang pesat pada saat itu (Gwon, 2005).

Meningkatnya partisipasi para *haenyeo* berdampak pada perubahan besar-besaran terhadap corak perekonomian Pulau Jeju, yang sebelumnya berupa desa pertanian, menjadi desa perikanan (Lee & Myong, 2018). Keistimewaan ini membuat para *haenyeo* berperan sebagai tulang punggung keluarga, sekaligus meningkatkan perekonomian lokalnya. Namun, dengan penerapan kebijakan pemerintah Jepang terhadap sektor perikanan yang bersifat sangat eksploitatif, para *haenyeo* tidak tinggal diam dan melakukan protes untuk melawan kebijakan tersebut. Para *haenyeo* di masa kolonialisme telah memiliki inisiatif partisipasi politik demokratis, dalam organisasi mereka yang disebut *Jamsuhoe* atau Perkumpulan *Haenyeo*¹. Partisipasi mereka dalam aksi protes terhadap kebijakan perikanan yang diterapkan pemerintah Jepang di Jeju merupakan suatu bentuk partisipasi nyata mereka dalam ranah politik. Gerakan protes mulai dinisiasi pada Juni 1931, lalu mencapai puncaknya pada Januari hingga April 1932 di Sehwa-ri, Gujwa-eub.

Penelitian mengenai *haenyeo* Jeju telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti, baik peneliti Korea Selatan maupun peneliti asing. Sebagian besar penelitian terkini membahas usulan perkembangan *haenyeo* Jeju, serta signifikansinya dalam kehidupan bahari Jeju melalui perspektif ekologi Im (2014), dalam tulisannya, menyimpulkan bahwa jumlah *haenyeo* berkurang, sehingga para penduduk Pulau Jeju, yang begitu menghargai keunikan budaya komunitas *haenyeo*, melakukan upaya untuk mendaftarkannya sebagai warisan kebudayaan non benda di UNESCO. Im menawarkan solusi berupa peningkatan perekrutan para *hanyeo* muda yang dibarengi pembentukan sekolah khusus bagi para *haenyeo* berikut dengan sistem keamanan yang mumpuni. Selain memiliki keunikan dalam budaya komunitasnya, Hatfield & Hong (2019), dalam penelitian mereka, menyatakan bahwa para *haenyeo* juga memiliki pengetahuan tradisional mengenai lingkungan yang luar biasa (*Traditional Ecological Knowledge*). Sistem pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki para *haenyeo* ini dinilai memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga pelestarian *haenyeo* sebagai mata pencaharian sekaligus kebudayaan di Pulau Jeju. Namun, perubahan iklim mengancam pengetahuan ekologi ini menyusut. Hatfield dan Hong menawarkan solusi untuk menjaga sistem pengetahuan ini tetap lestari di kalangan *haenyeo*, yakni peningkatan unsur ritual dan religi, sebagai aspek kebudayaan yang sangat penting dalam praktik budaya komunitas *haenyeo*.

Satu penelitian lainnya dilakukan oleh Song (2020). Song mengemukakan bahwa sistem perikanan *haenyeo* dinilai sebagai bukti empiris bahwa GIAHS (*Globally Important Agricultural Heritage System*) didasari oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*)—konsep pelestarian pembangunan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa menghambat generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya kelak. Adapun konsep pelestarian dapat terwujud dari hubungan antara nilai-nilai GIAHS dalam

¹ Penyelam perempuan Jeju memiliki sebutan lain selain *haenyeo*, yakni *jamnyeo* dan *jamsu*.

sistem perikanan *haenyeo*, yang mencakup keamanan mata pencaharian dan makanan; agrobiodiversitas; sistem pengetahuan lokal dan tradisional, kebudayaan, sistem-sistem nilai, dan organisasi sosial; serta keistimewaan daratan dan lautan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha melihat sisi lain *haenyeo* tidak hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, melainkan juga sebagai salah satu agen kunci dalam gerakan resistensi terhadap imperialisme Jepang, terlepas dari posisi mereka yang cenderung ter subordinasi dalam struktur ekonomi di masa pendudukan Jepang. Dengan begitu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana para *haenyeo* Jeju dapat menggerakkan belasan ribu partisipan dalam aksi resistensi melawan imperialisme Jepang pada tahun 1932. Untuk memfokuskan penelitian, penulis menetapkan Gujwa-eub (Provinsi Gujwa) dan Seongsan-eub (Provinsi Seongsan), daerah di ujung utara Pulau Jeju sebagai batasan spasial, karena gerakan resistensi *haenyeo* dalam melawan imperialisme Jepang ini melibatkan para *haenyeo* dari sejumlah desa dari kedua provinsi tersebut. Selain itu, penulis juga menetapkan Juni 1931 hingga Januari 1932 sebagai batasan temporal karena proses perencanaan hingga eksekusi aksi resistensi berlangsung dalam jangka periode tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi berbagai tahap seperti heuristik atau mengumpulkan sumber-sumber evidensi sejarah, melakukan kritik internal dan eksternal terhadap sumber serta evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap penulisan sejarah atau historiografi (Sjamsuddin, 2007). Dengan menerapkan metode ini, penulis memanfaatkan sebuah sumber arsip berupa surat kabar sezaman, yaitu Maeil Shinbo, yang diakses pada laman digital Perpustakaan Nasional Republik Korea (nl.go.kr). Surat kabar Maeil Shinbo merupakan salah satu surat kabar Korea pada masa pendudukan Jepang, sekaligus yang memuat informasi mengenai *haenyeo* Jeju pada masa itu. Penulis juga menggunakan sejumlah sumber pustaka sebagai sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, tesis, serta surat kabar daring untuk melengkapi data penelitian. Dua artikel jurnal garapan Park Chan-sik, '*제주 해녀역사적 고찰 (A Historical Study of Women Diver in Jeju Island)*' dan '*제주해녀투쟁의 역사적 기억 (A Historical Memory of Chejudo Women Diver Fighting)*' memuat penjelasan yang cukup lengkap dan komprehensif mengenai sejarah *haenyeo* Jeju dan gerakan resistensi mereka pada masa kolonialisme Jepang dengan memanfaatkan tradisi lisan dari para beberapa *haenyeo* yang ikut berkontribusi dalam gerakan tersebut. Kedua artikel jurnal ini sangat membantu menutupi kekurangan sumber arsip mengenai gerakan resistensi *haenyeo* yang aksesnya sangat terbatas. Selain itu, sebuah buku berjudul '*제주여성사 II (Sejarah Perempuan Jeju Jilid II)*' yang diterbitkan oleh *Jeju Development Institute* pada 2011, mencakup perjalanan sejarah perempuan Jeju dari masa kolonialisme Jepang. Dari buku ini, penulis dapat melengkapi penjelasan lebih lengkap mengenai kelompok-kelompok perempuan yang juga ikut berjuang melawan penjajahan Jepang, termasuk para *haenyeo*. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan lalu dievaluasi dengan memastikan keabsahannya untuk menjaga otentisitas data penelitian. Data-data tersebut kemudian ditulis secara sistematis pada tahap historiografi.

Hasil Penelitian

Haenyeo di Masa Kolonialisme Jepang

Sebagai masyarakat kepulauan, kehidupan masyarakat Jeju bergantung pada hasil pertanian dan bahari. Namun, karena iklim yang tidak begitu mendukung untuk memaksimalkan hasil tani, masyarakat Jeju akhirnya cenderung lebih bergantung pada hasil bahari, yakni dalam sektor perikanan. Hal ini diperkuat oleh melimpahnya sumber daya bahari Jeju, seperti abalon, ikan, rumput laut, dan berbagai hasil bahari lainnya. Oleh karena itu, beberapa mata pencaharian seperti pedagang dan *haenyeo* menjadi hal umum di Jeju. Tidak sedikit pula pedagang Jepang yang bermukim di Jeju saat Korea berada di bawah pendudukan Jepang (1911-1945). Sebagai penyelam handal, peranan para *haenyeo* tentunya sangat penting untuk mengumpulkan berbagai hasil bahari Jeju, yang kemudian didistribusikan untuk tujuan komersil. Sebelum masa pendudukan Jepang, sistem pekerjaan *haenyeo* mengikuti corak komunal tradisional. Mereka bekerja di laut terdekat di desa tempat mereka tinggal. Akses mereka ke laut tidak dibatasi. Oleh karena itu, *haenyeo* di pra-kolonial memiliki hak penuh untuk mengumpulkan hasil bahari di tempat mereka bekerja. Meskipun akses mereka ke laut tidak dibatasi, mereka tidak memiliki daya untuk melakukan tawar-menawar dengan pedagang-pedagang tertentu yang membeli hasil tangkapan mereka. Mereka tidak dibekali pengetahuan yang cukup mengenai perdagangan, serta tidak diawasi oleh sistem pasar bebas. Keadaan itu akhirnya memungkinkan para pedagang melakukan monopoli di daerah tertentu. Dengan begitu, para *haenyeo* hanya mampu menjual hasil tangkapan mereka ke pedagang yang berkuasa di daerah tempat mereka bekerja. Mereka tidak memiliki kuasa atas dominasi para pedagang di daerah mereka, karena kurangnya edukasi serta posisi mereka yang berada di subordinasi laki-laki. Hal ini secara otomatis membuat posisi mereka tersubordinasi pula oleh pihak kolonial, sehingga mereka tidak memiliki kuasa politik untuk bernegosiasi dengan orang-orang Jepang. Dengan demikian, posisi *haenyeo* dalam sistem masyarakat Jeju cenderung bersifat inferior (Gwon, 2005).

Pada masa pendudukan Jepang di Korea sejak 1911, peran *haenyeo* dalam meningkatkan perekonomian lokal dinilai sangat menguntungkan bagi pemerintah kolonial Jepang. Keterampilan para *haenyeo* dalam mengumpulkan hasil laut tentunya menjadi perhatian pemerintah kolonial. Sebuah tulisan dalam surat kabar *Maeilshinbo*, terbitan 6 Desember 1926, menceritakan ketangguhan para *haenyeo*. Dalam tulisan tersebut, terdapat kutipan dalam aksara Korea yang bertuliskan, “체류도에 유명한 것은 해녀 [chejyudo-e yumyeonghan geoseun haenyeo]”, yang berarti “Yang terkenal di Pulau Jeju adalah *haenyeo*”. Dilihat dari kutipan tersebut, penyebutan ‘제주도’ (*Jejudo*) yang berarti ‘Pulau Jeju’ masih menggunakan ejaan lama, yakni ‘체류도’ (*Chejyudo*). Kutipan ini dilanjutkan dengan pernyataan yang berbunyi,

“Yang terkenal di Jeju adalah Haenyeo, para penyelam perempuan yang memanen hasil laut berupa abalon dan rumput laut... Sekuat apapun gelombang laut dan separah apapun angin bertiup, mereka berenang kesana kemari seperti bergerak keluar masuk rumah mereka, tanpa rasa takut; lebih mirip putri duyung daripada manusia biasa... Mereka bekerja hampir setiap hari dalam setahun kecuali pada bulan Desember dan Januari. Dikatakan pula bahwa di mereka tetap menyelam di kedalaman laut meski dalam kondisi hamil, kecuali di bulan

terakhir menuju waktu persalinan serta di bulan setelah persalinan. Oleh karena itu, mereka memiliki tubuh berotot dengan kulit menyerupai mahogany, menjadi lambang perempuan pekerja yang tidak kenal akan dingin meski berada di tengah cuaca yang dingin, tidak kenal pula akan sakit meski sebenarnya sedang dalam kondisi sakit” (Maeil Shinbo, 1926).

Kutipan warta ini menunjukkan keistimewaan *haenyeo* begitu diakui pada masa pendudukan Jepang. Hal ini tentu dikarenakan profesi para *haenyeo* dinilai menguntungkan bagi upaya kapitalisme Jepang di Pulau Jeju. Selain itu, kutipan ini juga menunjukkan adanya anomali dalam melihat posisi *haenyeo* sebagai pihak yang inferior dalam sistem masyarakat Jeju pada masa kolonialisme Jepang. Jelas terlihat bahwa kutipan warta ini terkesan begitu menyanjung kehebatan para *haenyeo* yang telah berkontribusi terhadap perekonomian lokal Jeju. Sebagai agen ekonomi independen, para *haenyeo* juga berperan sebagai tulang punggung keluarga. Perekonomian Jeju yang meningkat secara pesat pada tahun 1930-an tidak lepas dari kontribusi para *haenyeo*. Dengan demikian, mereka tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga mereka, melainkan juga meningkatkan perekonomian lokal Jeju. Namun, pada realitanya, para *haenyeo* justru cenderung diperlakukan tidak adil terlepas dari kontribusi mereka dalam meningkatkan perekonomian lokal Jeju.

Memasuki dekade 1930-an, produk laut hasil tangkapan *haenyeo* menjadi komoditas dengan tingkat permintaan yang sangat tinggi sehingga harganya pun juga tinggi. Hal ini kemudian membuat tingkat partisipasi *haenyeo* dalam perekonomian Jeju meningkat pesat. Pada masa ini, corak sistem pekerjaan *haenyeo* diwarnai dengan aktivitas migrasi, yang disebut juga dengan *chulga*. Mereka bermigrasi ke Semenanjung Korea, Jepang, bahkan Cina dan Rusia (Vladivostok). Tempat-tempat yang paling banyak dikunjungi *haenyeo* meliputi Busan dan daerah-daerah di sekitarnya (Semenanjung Korea), serta Daemado di Jepang. Sistem pekerjaan ini memungkinkan *haenyeo* untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada menjual hasil produk mereka di daerah mereka sendiri. Pada tahun 1934, nilai produksi keseluruhan yang dikumpulkan oleh 5.000 orang *haenyeo* dengan sistem *chulga* mencapai 700.000 yen, sedangkan 5.500 orang *haenyeo* yang bekerja di daerah mereka hanya berhasil mengumpulkan 270.000-280.000 yen (Gwon, 2005)

Kendati demikian, sistem *chulga* ini pun bersifat hierarkis dan menempatkan *haenyeo* di posisi terbawah lingkup ekonomi. Sistem ini merupakan sistem buruh kontrak antara pihak penyewa daerah laut (*guakamju*) yang merupakan pedagang kapital Jepang dengan para *haenyeo*. Adapun pihak pengawas (*gegju*) yang bertugas mengawasi kerja *haenyeo*. Sebagian besar dari mereka merupakan orang Korea. Dalam sistem kontrak ini, hak *haenyeo* begitu dibatasi. Tenaga kerja mereka dikontrol ketat oleh pihak pedagang Jepang dan pihak pengawas. Bahkan, mereka tidak memiliki hak penuh terhadap daerah laut tempat mereka bekerja serta terhadap produk laut hasil tangkapan mereka. Hal ini juga membuat mereka tidak dapat memperoleh upah penuh dari hasil laut yang mereka kumpulkan untuk para pedagang kapital Jepang. Selain itu, tidak sedikit *haenyeo* yang mengalami pelecehan seksual. Tindakan asusila ini pun berakar dari ketidakadilan dalam pembagian hasil antara *guakamju*, *gegju*, dan para *haenyeo*. Apabila *haenyeo* ingin mendapatkan hasil bagi yang seimbang, mereka dipaksa untuk ‘melayani’ *guakamju* maupun *gegju*. Hal ini kemudian berimbas pada stigma negatif terhadap

para *haenyeo* di kalangan masyarakat, yakni sebagai perempuan yang menjual diri. Dengan demikian, para *haenyeo*, termasuk keluarga mereka, dihadapkan pada kesulitan dalam kehidupan sosial berupa pengucilan. Stigma negatif ini justru diakibatkan oleh posisi ter subordinasi para *haenyeo* itu sendiri oleh para pedagang Jepang (Gwon, 2005).

Perjuangan Ekonomi *Haenyeo* di bawah Imperialisme Jepang

Kontribusi *haenyeo* yang begitu besar dalam meningkatkan perekonomian Jeju di bawah pemerintahan Jepang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan. Jepang mengkapitalisasi hasil laut Jeju dengan mengeksploitasi tenaga kerja para *haenyeo* serta memberlakukan kebijakan sektor perikanan yang semena-mena, yang akhirnya membuat para *haenyeo* kehilangan kepercayaan. Tindakan pemerintah kolonial yang semena-mena ini menimbulkan sikap anti-Jepang dalam diri para *haenyeo* seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan ketertindasan rakyat Korea akibat penjajahan. Tahun 1920-an merupakan periode gerakan signifikan kelompok-kelompok pemuda dan pemudi intelektual. Kelompok-kelompok pemuda intelektual yang dibentuk di sejumlah daerah di Gujwa-eub, Jeju, meliputi *Hamdeok Yeoja Cheongnyeonghwe* (Asosiasi Pemuda Hamdeok), *Jeju Yeoja Cheongnyeonghwe* (Asosiasi Pemuda Jeju), *Jocheon Yeoja Cheongnyeonghwe* (Asosiasi Pemuda Jocheon), *Shinchon Yeoja Cheongnyeonghwe* (Asosiasi Pemuda Shinchon). Pada tahun 1925 hingga 1927, kelompok-kelompok ini beralih menjadi satu kesatuan asosiasi perempuan. Sekolah-sekolah untuk perempuan yang sudah terbentuk digunakan sebagai kesempatan untuk memperoleh kesadaran akan kondisi mereka yang terjajah. Asosiasi perempuan tersebut akhirnya menggencarkan gerakan pencerahan yang progresif. Kelompok-kelompok intelektual muda, baik laki-laki maupun perempuan, berupaya untuk mempersiapkan gerakan kemerdekaan melalui pendidikan (Jeju Development Research Institute, 2011).

Pada tahun 1930-an, kelompok-kelompok pemuda dan pemudi Jeju beralih bergerak di bawah tanah seiring dengan semakin opresifnya pemerintah kolonial. *Hyeokwoo Dongmaeng* (Aliansi Revolusioner Hyeokwoo) merupakan kelompok intelektual muda bentukan tahun 1930 yang paling terkenal di Gujwa-eub. Kelompok ini secara aktif merespons isu terkait eksploitasi *haenyeo* yang dilakukan oleh Asosiasi Perikanan *Haenyeo* Jeju (Development Research Institute, 2011). Sebagai upaya mempersiapkan diri untuk memperjuangkan kemerdekaan, kelompok ini mendirikan klub baca, dengan memanfaatkan buku-buku beraliran sosialis. Mereka mempelajari bagaimana keadaan dunia pada saat itu, bagaimana keadaan Dunia Timur, termasuk Korea. Mereka juga mengidentifikasi berbagai kontradiksi yang dihasilkan sistem kapitalisme dalam imperialisme Jepang. Dari kegiatan tersebut, mereka memperoleh kesadaran berjuang untuk kemerdekaan. Upaya tersebut juga mereka lakukan kepada anak-anak muda lainnya yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Mereka mulai menyebarkan pendidikan pencerahan di sejumlah sekolah malam, khususnya sekolah malam untuk perempuan, termasuk para *haenyeo*, yakni *Hado Gangseubso* (Sekolah Malam Hado) (Jeju Development Research Institute, 2011).

Hado Gangseubso telah melahirkan lulusan tokoh-tokoh *haenyeo* yang memimpin aksi resistensi terhadap imperialisme Jepang, yakni Bu Chun-hwa, Bu Deok-ryang, Kim Ok-ryeon,

dan Go Soon-hyo. Di sekolah tersebut, mereka tidak hanya mempelajari baca-tulis *hangeul* (aksara Korea) dan *hanja* (aksara Cina), melainkan juga sejarah Korea, pendidikan pencerahan, serta cara membaca timbangan, kecuali bahasa Jepang. Buku-buku bacaan mengenai perjuangan kaum petani (*nodong dokbon*) dan perjuangan buruh (*nongmin dokbon*) dijadikan sebagai buku acuan dalam pendidikan pencerahan tersebut. Para *haenyeo* di sekolah ini terdiri dari latar belakang usia yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap memperoleh porsi pendidikan yang sama. Pada tahun 1928, Bu Chun-wa, di usianya yang ke-21 tahun, memegang jabatan sebagai Ketua *Jejudo Haenyeo Johab* (Asosiasi *Haenyeo* Jeju). Ia aktif menyelenggarakan serangkaian pertemuan *haenyeo*. Kim Ok-ryeon, Go Soon-hyo, dan Bu Deok-ryang juga turut memimpin serangkaian pertemuan *haenyeo* untuk merencanakan aksi protes. Pendidikan yang mereka dapatkan dari sekolah malam berpengaruh besar dalam membentuk kesadaran nasionalisme, serta menumbuhkan semangat juang mereka dalam meraih kemerdekaan (Park, 2007).

Sejak Jepang mulai menguasai perekonomian Korea, Asosiasi Perikanan *Haenyeo* Jeju (*Jeju Haenyeo Eoeob-Johab*) dibentuk pada 16 April 1920 guna mengawasi dan melindungi hak-hak para *haenyeo*. Namun, alih-alih melindungi, asosiasi ini justru cenderung melanggarnya (Jeju Development Research Institute, 2011). Mereka dipaksa membayar pajak dengan jumlah yang tinggi untuk hasil laut yang mereka dapatkan dengan tangan mereka sendiri, yakni sebanyak empat kali lipat dari pendapatan mereka yang mereka hasilkan selama enam setengah bulan lamanya. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar pajak keanggotaan mereka di asosiasi dengan jumlah yang tidak kalah tinggi. Hal ini membuat para *haenyeo* tidak dapat menerima hak mereka yang semestinya dari hasil tangkapan mereka. Bahkan, hasil tangkapan laut para *haenyeo* dimanipulasi ketika melewati proses penimbangan sehingga harga yang ditetapkan lebih rendah. Dengan adanya kecurangan ini, *haenyeo* tidak dapat tinggal diam dan mulai menyuarakan protes mereka terhadap kebijakan tersebut. Pada awal tahun 1930, insiden *miss-selling* berupa manipulasi timbangan hasil tangkapan laut (*bujeong-panmae*) mengundang protes para *haenyeo* dan pemuda Seongsan-po (Provinsi Seongsan). Empat orang pertama yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan tersebut ditangkap polisi dan ditahan selama 29 hari. Mengetahui hal ini, *haenyeo* dan pemuda Seongsan-po segera menyebarluaskan ketidakadilan ini ke seluruh daerah Seongsan-po dan Gujwa-eub (Provinsi Gujwa). Namun, para pemuda dari desa Hado-ri, Gujwa-eub, yakni Oh Moon-gyu dan Bu Seung-rim (kakak dari Bu Chun-hwa, yang nantinya menjadi salah satu penggerak aksi resistensi *haenyeo*), selaku penanggung jawab penyebaran informasi mengenai kecurangan asosiasi perikanan terhadap hasil tangkapan *haenyeo*, ditahan dan dijatuhi penalti oleh polisi setempat (Park, 2007).

Insiden penangkapan sejumlah tokoh pemuda di Seongsan-po (Seongsan-eub) memicu pergerakan aktif para *haenyeo* untuk segera menyebarluaskan kabar terkait ketidakadilan asosiasi tersebut kepada warga setempat. Tidak hanya itu, para *haenyeo* juga segera mengadakan pertemuan untuk merencanakan aksi protes. Aksi protes yang paling signifikan dilakukan oleh para *haenyeo* di Seongsan-po dan Gujwa-eub, termasuk para *haenyeo* Hado-ri yang terletak di Gujwa-eub. Mereka berjuang keras menentang kebijakan eksploitatif asosiasi

perikanan guna memperjuangkan hak mereka. Pada tahun 1931, Asosiasi Perikanan *Haenyeo* di Hado-ri menetapkan harga yang sangat rendah terhadap hasil tangkapan *haenyeo* yang berupa *gamtae* (*ecklonia cava*; sejenis rumput laut) dan abalon. Karena merasa tidak terima, para *haenyeo* Hado-ri pun memprotes keras kebijakan penetapan harga ini dan mengajukan permintaan kepada asosiasi perikanan untuk mencabut kebijakan tersebut. Sebagai respons, pihak asosiasi perikanan berjanji akan menepati permintaan tersebut, namun selang beberapa bulan, mereka tidak kunjung menepati janji. Tidak ada pergerakan sama sekali dari asosiasi perikanan untuk segera mencabut kebijakan penetapan harga terhadap hasil tangkapan *haenyeo* yang cenderung arbitrer. Hal ini membuat para *haenyeo* Hado-ri semakin geram. Akhirnya, pada Juni 1931, mereka mulai merencanakan aksi resistensi untuk menuntut keadilan. Sebagai langkah pertama, sekumpulan *haenyeo* Hado-ri pergi menyebarkan kabar mengenai ketidakadilan asosiasi perikanan kepada para penduduk dan sejumlah *haenyeo* lainnya di beberapa desa terdekat, yakni Jongdal-ri, Yeonpyeong-ri, dan Sehwa-ri. Mereka mengajak para penduduk untuk ikut bekerjasama melindungi hak-hak sipil dari ketidakadilan pemerintah kolonial dengan menyerukan pernyataan yang berbunyi, “우리들의 생활과 이익을 지키기 위해서는 단결하여 싸워야 한다 [*urideur-eui saenghwal-kwa iik-eul jikiji wihaeseoneun dangyeohayeo ssawoya handa*]” (“Kita harus melakukan perlawanan demi melindungi hak-hak kita!”) (Park, 2007).

Resistensi Politik *Haenyeo* terhadap Imperialisme Jepang

Menyikapi respons pasif pihak asosiasi perikanan, berbagai rapat pun diadakan oleh para *haenyeo* untuk membahas rencana aksi demonstrasi serta menyusun serangkaian permintaan berisi persyaratan-persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh pihak asosiasi perikanan, terkait kebijakan distribusi hasil tangkapan yang bersifat adil. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh para *haenyeo*, tetapi juga serikat petani serta sejumlah kaum intelektual muda, seperti Bu Seung-rim, sepasang kakak-beradik Oh Moon-gyu dan Oh Moon-soon, dan Kim Sun-jong (Park, 2007). Pada 20 Desember 1931, para *haenyeo* Hado-ri mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Go Soon-hyo, Kim Ok-ryeon, dan Bu Chun-wa, untuk melakukan finalisasi rancangan pengajuan yang akan diserahkan kepada pihak asosiasi perikanan, serta finalisasi kebijakan-kebijakan aksi resistensi. Adapun isi dari pengajuan tersebut adalah: 1) seluruh hasil tangkapan laut wajib dijual berdasarkan jenisnya, namun penawaran harga harus dikehendaki oleh produser; 2) Go Pyeong-ho, pihak yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan harus segera dijatuhi hukuman, serta asosiasi bertanggung jawab atas hal tersebut; 3) Pihak asosiasi wajib memberikan kompensasi berdasarkan jumlah produksi *haenyeo*; 4) Pihak asosiasi wajib melakukan reevaluasi terhadap penjualan *gamtae* secepatnya; 5) Karyawan asosiasi yang bekerjasama dengan pedagang yang melakukan kecurangan harus segera dipecat dan dijatuhi hukuman; serta 6) Pihak asosiasi dilarang menetapkan kebijakan yang bersifat mengelabui anggotanya (*haenyeo*)². Setelah proses finalisasi selesai, para *haenyeo* Hado-ri berangkat

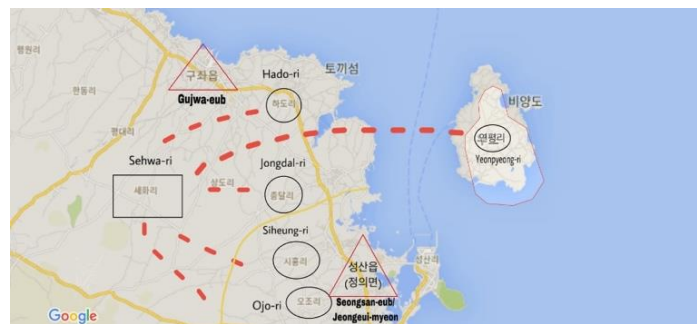
² Isi dari kebijakan aksi resistensi tersebut terdiri dari: 1) Para anggota (*haenyeo*) wajib melakukan protes di depan kantor asosiasi, terus berjuang dengan tetap berada di tempat protes hingga pengajuan disetujui oleh pihak asosiasi; 2) Seluruh *haenyeo* yang ikut berpartisipasi dalam aksi resistensi wajib hanya mengonsumsi makanan-makanan Barat (terutama *ddeok* atau kue beras); 3) Meminta pihak asosiasi untuk menjual hasil tangkapan laut (yang

menuju Jeju-eub, tempat kantor pusat asosiasi perikanan berada. Untuk menghindari kemungkinan penangkapan polisi, mereka memutuskan pergi ke Jeju-eub melalui jalur laut dengan mengendari perahu motor. Namun, perjalanan tidak berhasil mereka lanjutkan akibat cuaca buruk yang disertai badai sehingga aksi resistensi ditunda dan dilanjutkan di tahun selanjutnya (Park, 2007).

Akhirnya, pada 7 Januari 1932, sebanyak 300 *haenyeo* Hado-ri memulai aksi demonstrasi dengan berkumpul terlebih dahulu di Pasar Sehwa, Sehwa-ri, bertepatan dengan Hari Pasar Sehwa-ri (*Sehwa-ri Jangnal*). Mereka mengenakan *homi* (ikatan handuk putih di kepala) serta membawa *bichang* (alat menyerupai cangkul yang digunakan untuk menangkap abalon) di pundak masing-masing (Park, 2019). Para *haenyeo* lainnya dari desa-desa terdekat seperti Jongdal-ri, Yeonpyeong-ri, dan Sehwa-ri juga ikut bergabung di titik kumpul, membahas rencana aksi demonstrasi. Mereka kemudian berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi sembari bergerak menuju Jeju-eub. Aksi demonstrasi terus berlanjut hingga mereka tiba di Pyeongdae-ri, Gujwa-eub, tempat kantor Asosiasi Perikanan *Haenyeo* cabang Gujwa-eub berada. Setelah mengetahui permintaan yang diajukan oleh para *haenyeo*, kepala asosiasi menyatakan bahwa permintaan para *haenyeo* akan dipenuhi. Aksi demonstrasi pun dihentikan pada pukul lima sore (Park, 2007).

Kendati kepala Asosiasi Perikanan *Haenyeo* cabang Gujwa-eub telah menunjukkan respons yang menjanjikan, pada kenyataannya, janji tersebut tidak kunjung ditepati. Di sisi lain, para *haenyeo* di Gujwa-eub dan Seongsan-eub merasa semakin geram dengan kebijakan asosiasi perikanan *haenyeo*, yakni penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sesungguhnya (*jijeong-panmae*) (Park, 2005). Akhirnya, para *haenyeo* dari masing-masing desa dari kedua provinsi tersebut mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan ketidakpuasan mereka. Rasa perlawanan pun semakin menguat dalam diri para *haenyeo*. Masih dalam periode Hari Pasar Sehwa-ri, yakni 12 Januari 1932, Takuchi Deiki, Gubernur Jeju sekaligus kepala Asosiasi Perikanan *Haenyeo* Jeju mengunjungi Gujwa-eub. Kesempatan ini digunakan oleh para *haenyeo* dari Hado-ri, Sehwa-ri, Jongdal-ri, Yeonpyeong-ri di Gujwa-eub, serta Ojo-ri dan Siheung-ri di Seongsan-eub (sekarang bernama Jeongeui-myeon) untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Gubernur Takuchi. Sekitar 300 *haenyeo* dari Ojo-ri dan Jongdal-ri, 300 *haenyeo* dari Hado-ri, serta 4.000 *haenyeo* dari Sehwa-ri berkumpul dalam satu waktu di sebelah timur Kantor Polisi Sehwa pada pukul 11:30 siang (Jeju Development Research Institute, 2011).

dikumpulkan *haenyeo*) di tempat protes. Apabila pihak asosiasi gagal menjualnya, maka mereka tidak diperkenankan untuk mengintervensi urusan terkait hasil tangkapan laut; 4) Para *haenyeo* wajib bersikeras untuk mengajukan kebebasan menjual hasil tangkapan laut; 5) Menghubungi rekan masing-masing sehingga perwujudan aksi resistensi dapat meluas secara proaktif; 6) Para *haenyeo* tidak diperkenankan untuk bertindak seperti pengecut meskipun pihak kepolisian datang untuk menangkap sekalipun; serta 7) Harus ada anggota yang memiliki pengetahuan geografi untuk mempelajari peta lokasi demonstrasi, serta bertanggung jawab dalam mengikuti arahan dari para perwakilan *haenyeo* serta menjaga komunikasi dengan para anggota (Park, 2007: 44).



Gambar 1. Ilustrasi pergerakan *haenyeo* Gujwa-eub dan Seongsan-eub, peta telah direkonstruksi ulang oleh penulis untuk menggambarkan pola gerakan resistensi *haenyeo* (Sumber: Google Maps).

Setelah berkumpul, para *haenyeo* kemudian pergi menuju Pasar Seoha. Mereka mengayun-ayunkan *bichang* dan *homi* yang semula diikatkan di kepala mereka masing-masing sembari meneriakkan seruan-seruan penuh semangat. Setelah berkumpul di Pasar Seoha, para perwakilan *haenyeo* dari masing-masing desa, satu per satu, menyampaikan pidato untuk saling menguatkan satu sama lain dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Tepat pada saat itu, sebuah mobil yang membawa Gubernur Takuchi dan dikendarai oleh polisi kembali dari Gujwa-eub menuju kantor pusat tersebut. Polisi sempat menjauh dari tempat demonstrasi untuk menghindari para *haenyeo* namun upaya tersebut gagal. Para *haenyeo* yang menyadari kedatangan Gubernur Takuchi segera menghentikan kampanye dan berhasil mencegat mobil tersebut tepat di depan gerbang kantor pusat (Jeju Development Research Institute, 2011).

Mereka berkerumun mengelilingi mobil tersebut sembari mengayun-ayunkan *homi* dan *bichang* masing-masing, lalu berseru, “우리들의 요구에 칼로써 대응하면 우리는 죽음으로써 대응한다 [urideur-eui yogu-e khallosseo daeeunghamyeon urineun jukeumeurosseo daeeunghanda] (Apabila Anda merespons permintaan kami dengan pisau, maka kami merespons dengan kematian!)” dengan semangat yang membara (Jeju Development Research Institute, 2011). Ketika keadaan menjadi semakin intens, Gubernur Takuchi memutuskan untuk melakukan dialog dengan para *haenyeo*. Sejumlah tuntutan terkait *jijeong-panmae bandae* (pelarangan manipulasi penetapan harga), *haenyeo johab-bi myeonje* (penghapusan biaya pajak keanggotaan *haenyeo*), *dosa-eui johabjang kyeomjik bandae* (pelarangan jabatan ganda kepala asosiasi), dan *ilbon sangin baecheok* (pelarangan keterlibatan pedagang Jepang) kemudian disampaikan secara langsung. Tuntutan tersebut mendapatkan respons positif dari Gubernur Takuchi. Ia berjanji akan memenuhi tuntutan para *haenyeo* dalam waktu lima hari. Namun, ketika Gubernur Takuchi pergi meninggalkan tempat, para polisi Jepang segera menahan 34 orang pemimpin *haenyeo*, serta puluhan kaum pemuda lainnya. Bahkan, polisi tambahan dari Departemen Kepolisian Jeonnam juga ikut membantu proses penangkapan yang berlangsung selama lima hari, yakni dari tanggal 23 hingga 27 Januari. Hal ini semakin mengundang protes para *haenyeo*. Pada 26 Januari, para *haenyeo* dari Yeongpyeong-ri, Pulau Udo, memimpin aksi protes terhadap penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mereka juga melakukan aksi protes dengan mengelilingi kapal polisi yang datang untuk menangkap mereka. Keesokan harinya, pada 27 Januari, para *haenyeo* dari

Jongdal-ri melakukan aksi protes, menuntut agar para tahanan segera dibebaskan. Polisi segera melakukan tindakan represif untuk meredakan aksi protes tersebut (Park, 2005).

Ancaman represif polisi tidak menyurutkan semangat para *haenyeo*. Sebanyak 4.500 orang yang terdiri dari *haenyeo* dan warga sipil menyerang para polisi dan berusaha membebaskan para tahanan. Dalam proses penyerangan ini, beberapa tahanan berhasil meloloskan diri. Hal ini kemudian membuat para polisi bertindak secara lebih represif dan semakin gencar dalam menangkap para *haenyeo* dan kelompok-kelompok pemuda yang memberontak. Total kaum pemuda dan *haenyeo* yang ditangkap polisi mencapai jumlah yang begitu masif, sedangkan ketiga pemimpin *haenyeo* yang sebelumnya ditahan, yakni Bu Chun-hwa, Bu Deok-ryang, dan Kim Ok-ryeon dari Hado-ri, dibebaskan, meski akhirnya mereka kembali ditahan selama enam bulan lamanya. Tokoh-tokoh pemuda intelektual yang mendukung aksi resistensi *haenyeo* juga ditangkap. Meski harus melewati serangkaian pengorbanan, perjuangan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Kendati sistem pasar yang ditetapkan pemerintah kolonial masih bersifat tidak adil, namun setidaknya, sebagian besar tuntutan para *haenyeo* berhasil terpenuhi. Kebijakan ‘penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sesungguhnya’ atau *jijeong panmae* dihapus, karyawan-karyawan asosiasi perikanan dan pedagang yang melakukan tindakan curang juga diberhentikan sementara selama sepuluh tahun. Selain itu, kewajiban membayar pajak keanggotaan bagi *haenyeo* yang berumur 50 tahun ke atas juga dihapus (Jeju Development Research Institute, 2011)

Dalam gerakan resistensi yang berlangsung selama sekitar 6 bulan dari tahun 1931 hingga 1932 ini, para *haenyeo* telah melakukan sebanyak 238 kampanye. Gerakan ini juga melibatkan sebanyak 17.000 partisipan demonstrasi yang tidak hanya meliputi para *haenyeo*, melainkan juga warga sipil. Bu Chun-hwa dan Kim Ok-ryeon ditahan selama 6 bulan di *Mokpo Hyeongmuso* (Penjara Mokpo). Bu Deok-ryang juga ditahan selama 6 bulan namun akhirnya meninggal di usia 27 tahun akibat penyiksaan yang dialaminya (Park, 2019). Gerakan ini merupakan gerakan anti-Jepang terbesar yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam sejarah Korea selama masa pendudukan Jepang (Park, 2007).

Kesimpulan

Gerakan resistensi *haenyeo* adalah wujud perjuangan rakyat Korea di Jeju sebagai golongan yang dirugikan oleh pemerintah kolonial. Gerakan ini juga sarat akan semangat juang kaum pemuda dan pemudi, yang mulai menyadari keharusan untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Gerakan ini juga menjadi bukti nyata bahwa *haenyeo* di masa kolonialisme Jepang juga memiliki andil yang cukup besar dalam berpolitik pada lingkup lokal, terlepas dari posisi mereka sebagai entitas yang cenderung dipandang rendah. Meskipun gerakan resistensi ini tidak dapat sepenuhnya melumpuhkan kapitalisme kolonial, tercapainya beberapa permintaan para *haenyeo*—penghapusan kebijakan ‘penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sesungguhnya’ (*jijeong panmae*), serta pemberhentian karyawan-karyawan asosiasi perikanan dan pedagang yang melakukan tindakan curang selama sepuluh tahun—setidaknya dapat dikatakan sebagai buah dari hasil perjuangan mereka, dan rakyat Jeju pada umumnya. Pemerintah kolonial akhirnya bersedia mengakomodir permintaan para

haenyeo meski tidak mencakup semuanya. Kegigihan para perempuan ini patut untuk terus diingat sebagai bentuk perjuangan menuju kemerdekaan. Selain itu, perjuangan mereka dalam melawan imperialisme Jepang ini juga patut dijadikan suatu refleksi di masa kini, bahwa dalam memahami dan memaknai *haenyeo* sebagai salah satu entitas budaya Jeju dengan segala keunikannya, aspek historis juga sangat penting untuk diperhatikan.

Daftar Rujukan

- Chisholm Hatfield, S., & Hong, S.-K. (2019). Mermaids of South Korea: Haenyeo (Women Divers) Traditional Ecological Knowledge, and Climate Change Impacts. *Journal of Marine and Island Cultures*, 8(1). <https://doi.org/10.21463/jmic.2019.08.1.01>
- Gwon, G.-S. (2005). *Changing Labor Processes of Women's Work: The Haenyo of Jeju Island* (Vol. 29). Korean Studies.
- Hwang, K. (2010). *A History of Korea*. Palgrave Macmillan.
- Im, A. (2014). A Study on the possibility of Haenyeo as a Sustainable Profession with Social Security to keep tangible and intangible cultural heritage of Haenyeo community. *World Environment and Island Studies*, 4(3), 59–70.
- Jeju Development Research Institute. (2011). 해녀항일운동. Dalam 제주여성사II 일제강점기 (Vol. 2, hlm. 183–205).
- Lee, S., & Myong, S. O. (2018). Portraits of Jeju Haenyeo as models of empowerment in the Korean newspaper Maeilshinbo during Japanese. *CLCWeb - Comparative Literature and Culture*, 20(2). <https://doi.org/10.7771/1481-4374.3284>
- Maeil Shinbo. (1926, Desember 6). *제주도에 유명한 것은 해녀 [chejyudo-e yumyeonghan geoseul haenyeo]* (Yang terkenal di Pulau Jeju adalah Haenyeo). Maeil Shinbo.
- Park, C. (2005). 제주 해녀의 역사적 고찰 (A Historical Study of Woman Diver in Jeju Island). *Korea Historical Folklore Institute*, 30, 135–168.
- Park, C. (2007). A Historical Memory of Chejudo Women Diver Fighting. *Research for the Tamla Culture Institute*, 30, 39–68.
- Park, S. (2019, Maret 18). [창간15주년 기횃-3.1운동 100주년 제주할일운동] 항일운동, 부당착취 맞선 저항 “활활” (Peringatan 100 Tahun Gerakan Resistensi Haenyeo terhadap Eksploitasi). *Jeju Sori News*. <http://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=300727>
- Preston, N. (2017). *Lost Mermaids: The Social and Economic Impacts of Development for Haenyeo Culture and Jeju Island*. University of Prince Edward Island.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Song, W. (2020). Sustainability of the jeju haenyeo fisheries system in the context of globally important agricultural heritage system (GIAHS). *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/SU12093512>.